

SKRIPSI

STUDI TENTANG PENGEMBANGAN WISATA PANTAI LAWATA SEBAGAI OBYEK WISATA UNGGULAN DI KOTA BIMA

*Study On The Development Of Lawata Beach Tourims As A Leading Tourist
Attraction In The City Og Bima*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun Oleh:

SURYANTI

217110081

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**STUDI TENTANG PENGEMBANGAN WISATA PANTAI
LAWATA SEBAGAI OBYEK WISATA UNGGULAN DI KOTA
BIMA**

Oleh:

SURYANTI

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal 13 agustus 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mustamin Idris, M.S
NIP.0031126482

Rahmad Hidayat, S.AP.M.AP
NIDN.0822048901

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP.M.AP
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI TENTANG PENGEMBANGAN WISATA PANTAI LAWATA SEBAGAI OBYEK WISATA UNGGULAN DI KOTA BIMA

Oleh:

SURYANTI
NIM. 217110081

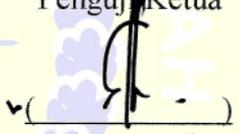
Telah dipertahankan didepan peguji
Pada tanggal 13 Agustus 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. H Mustamin Idris, M.S**
NIP.0031126482


Penguji Ketua

2. **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**
NIDN.0822048901


Anggota 1

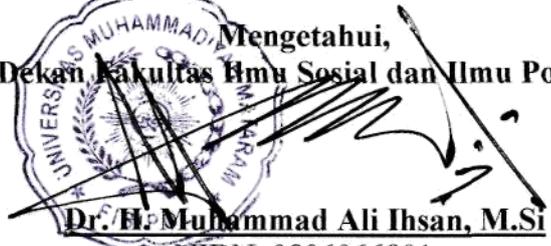
3. **Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si**
NIDN.0815118302


Anggota 2

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik


↳ **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**
NIDN: 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali Ihsan, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun diperguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan daftar pustaka. Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUNo. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 2021

Mahasiswa



SURYANTI
217110081



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryanti
 NIM : 217110081
 Tempat/Tgl Lahir : Woro, 18 Mei 1999
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 085 333 276 926 / suryantitaxi39@gmail.com
 Judul Penelitian : -

Studi tentang pengembangan wisata pantai lawata sebagai
 obyek wisata unggulan di kota Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryanti
NIM : 217110001
Tempat/Tgl Lahir : WORO, 18 Mei 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 333 276 926
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Studi tentang Pengembangan wisata Pantai Lawata sebagai
obyek wisata unggulan di Kota Bima

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis



Suryanti

NIM. 217110001

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Menulis itu tidak semudah mengkritik, maka hargailah usaha orang lain”

“pengetahuan adalah kekuatan”

“kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas segala kekuasaan dan Karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh syukur skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Special untuk kedua orang tua Syamsurizal dan Aminah. Yang paling saya cintai melebihi apapun, Terimakasih untuk setiap detik yang berharga dan bermakna dalam hidup karena cinta kasih seperti syurga yang selalu dilayangkan dalam doa, kesabaran serta perjuangan yang tidak mengenal lelah Terimakasih sudah berjuang sampai detik ini, untuk segalanya Terimakasih.
- Special untuk ayah sambung, ayah Syamsudin Terimakasih karena cinta, kasih sayang serta perhatiannya
- Special untuk sahabat saya Fitria Ningsih S.AP, Terimakasih karena dengan sabar membantu dan selalu mensupport di setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Terimakasih kepada keluarga besar atas doa-doa tulus yang selalu dipanjatkan selama ini.
- Sepupu (Sri Rahmawati Spd.i, Rusdin S.com, Agus widiyanto S.Kep Ners, Misnawati S.pd, Kamaludin S.TP, Abdarah, Suryani, Beti Suryanti, Rahmayanti, M. taufik, Ardiansyah, Nayla sakinah). Terimakasih atas dorongan dan dukungan selama ini.
- Keponakan (Asyifah Qur'anilah, Hanum Lutfia Salsabila, Meysah Putri Ramdani, dan M. Arka, M. Ramadhan) bibi sayang kalian.
- Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Woro Mataram (IMWM), Terimakasih karna sudah menjadi keluarga kedua di tanah rantau yang kejam ini.
- Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2017 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
- Almamater Tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, ijinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad ali, M.Si
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bapak Dedy Iswanto, S.T, MM Wakil Dekan 2 Bapak Amin Saleh, S.Sos, M.Si.
4. Bapak Rahmad Hidayat, S,AP, M.AP Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan berbagai macam saran dan kritik, di Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Drs. H. Mustamin Idris, M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak M. Taufik Rachman Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik fisipol UMMAT.
7. Yang penulis cintai dan hormati, yakni kedua orang tua yang sudah bersusah payah mendukung dan selalu memberikan motivasi pada saya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini.

Mataram, 2021

Suryanti 217110081

KATA PENGANTAR

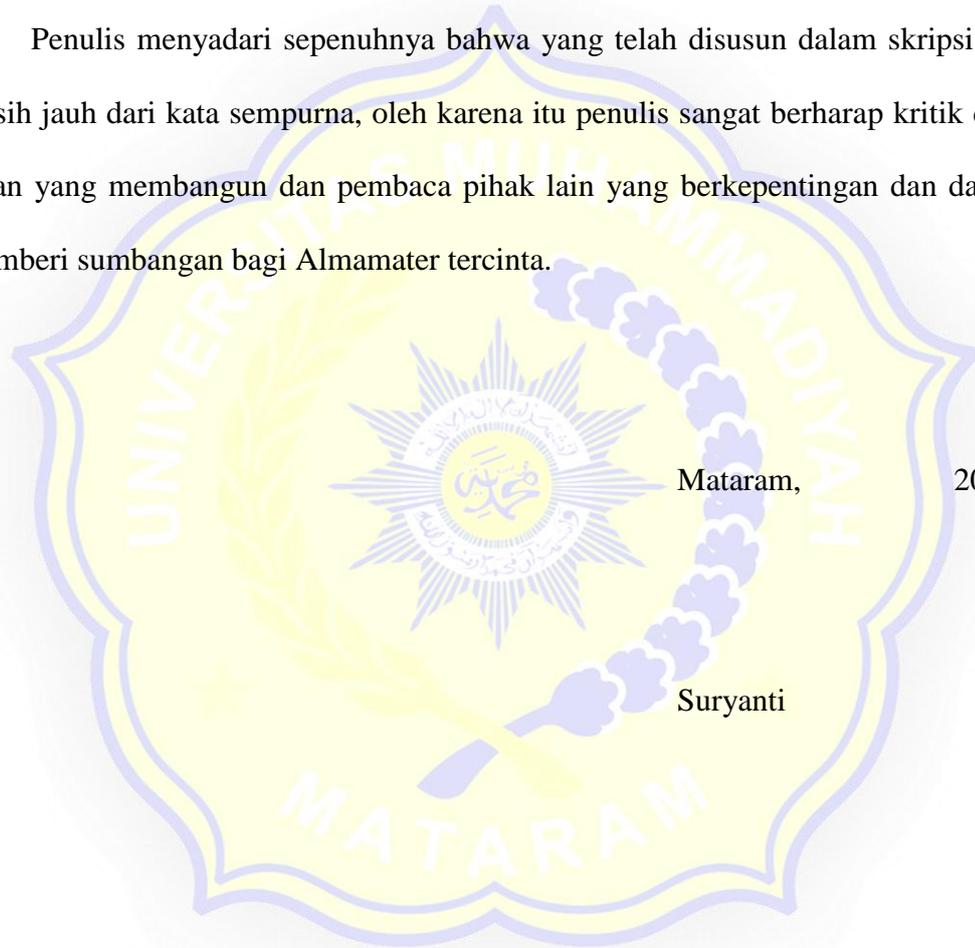
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul '*Studi Tentang Pengembangan Wisata Pantai Lawata Sebagai Obyek Wisata Unggulan di Kota Bima*'. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata-1 di Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. H. Mustamin Idris, M.S sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP sebagai Dosen Pembimbing II dan selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini..

5. Orang tua peneliti yang selalu memberikan Doa dan motivasi serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah tulus dan ikhlas memberi doa dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang telah disusun dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dan pembaca pihak lain yang berkepentingan dan dapat memberi sumbangan bagi Almamater tercinta.



STUDI TENTANG PENGEMBANGAN WISATA PANTAI LAWATA SEBAGAI OBYEK WISATA UNGGULAN DI KOTA BIMA

Suryanti¹, Drs. H. Mustamin Idris, M.S², Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP³

¹Mahasiswa

²Pembimbing Utama

³Pembimbing Pendamping

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengembangan Wisata, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Lawata Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik analisa data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dicapai bahwa Strategi Pengembangan telah dilakukan dengan maksimal, meliputi: penataan obyek wisata, pelatihan pemandu wisata, pengadaan sarana dan prasana pendukung dan implementasi program sasaran rencana, Selanjutnya prospek kunjungan wisatawan 3 tahun terakhir mengalami peningkatan hingga 66,22 % dari tahun 2018 ke 2019, kemudian kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 3 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 18,50 %, sedangkan dampak positif bagi masyarakat sekitar berkontribusi meningkatkan pendapatan dan terpenuhinya kebutuhan keluarganya.

Kata kunci: Pengembangan, wisata, obyek

STUDY ON THE DEVELOPMENT OF LAWATA BEACH TOURISM AS A LEADING TOURISM OBJECT IN BIMA CITY

Suryanti¹, Drs. H. Mustamin Idris, M.S², Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP³

¹Student

²First Consultant

³Second Consultant

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study aims to find out how tourism development is, and what are the supporting and inhibiting factors in the development of Lawata Beach Tourism in Bima City. This research used a qualitative analysis with data analysis techniques employs interviews, observation, and documentation.

The Development Strategy was carried out optimally, according to this study, which included structuring tourist objects, training tour guides, procuring supporting facilities and infrastructure, and implementing specified target programs. Furthermore, the likelihood of tourist visits has climbed to 66.22% in the last three years, up from 2018. In 2019, the tourism sector's contribution to PAD climbed by an average of 18.50% over the previous three years, while the good influence on the local community contributed to improved income and satisfying the requirements of their families.

Keywords: Development, tourism, object



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERYANTAAAN ORISINALITAS | iv |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT..... | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Strategi Pengembangan Wisata | 14 |
| B. Pengertian Pariwisata dan Pengembangan Wilayah..... | 19 |
| C. Pariwisata dan Dampak yang Ditimbulkannya..... | 23 |
| D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata | 28 |
| E. Peran Pariwisata dalam Pembangunan | 32 |
| F. Upaya Memaksimalkan Peran Pariwisata dalam Pembangunan | 37 |
| G. Kerangka Berpikir..... | 40 |
| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis penelitian | 41 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 42 |
| C. Pemilihan Informasi/Narasumber | 42 |

| | |
|---------------------------------|----|
| D. Sumber dan Jenis Data | 43 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| F. Teknik Analisa Data | 45 |
| G. Keabsahan Data | 47 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

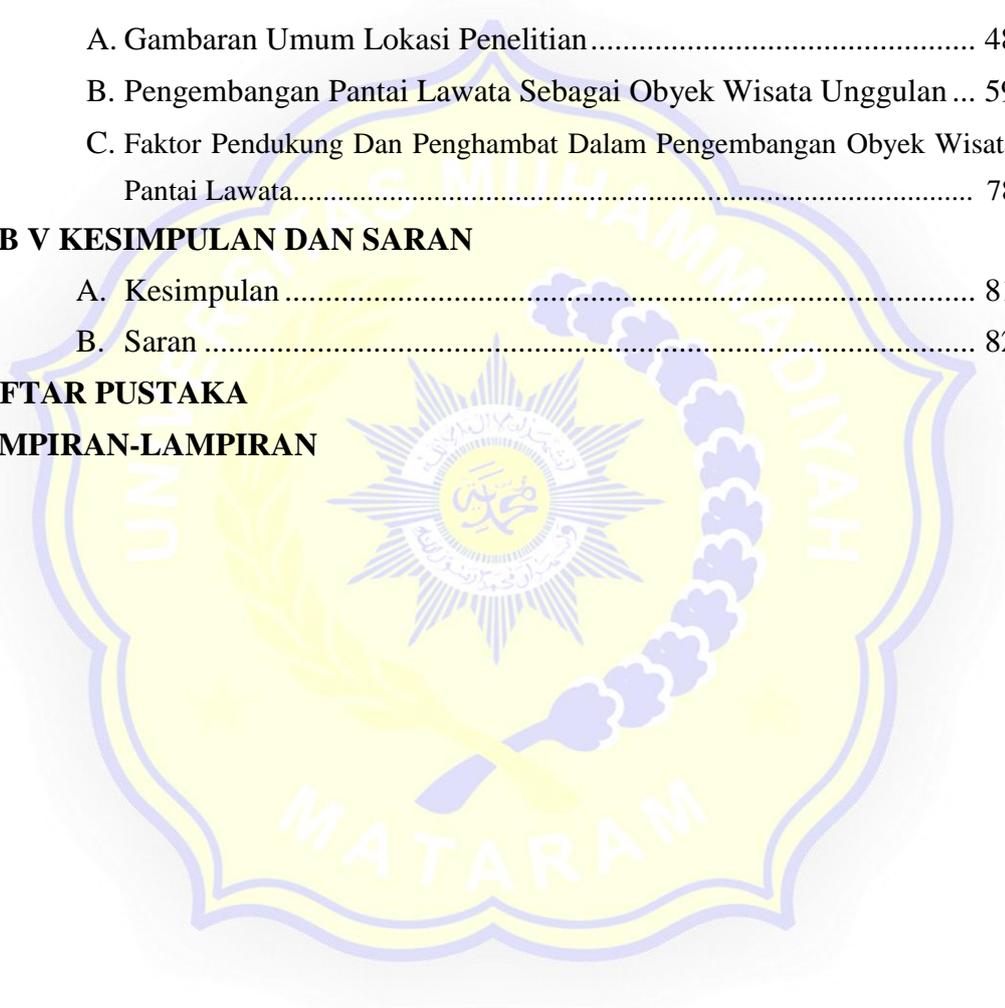
| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 48 |
| B. Pengembangan Pantai Lawata Sebagai Obyek Wisata Unggulan ... | 59 |
| C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Lawata..... | 78 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

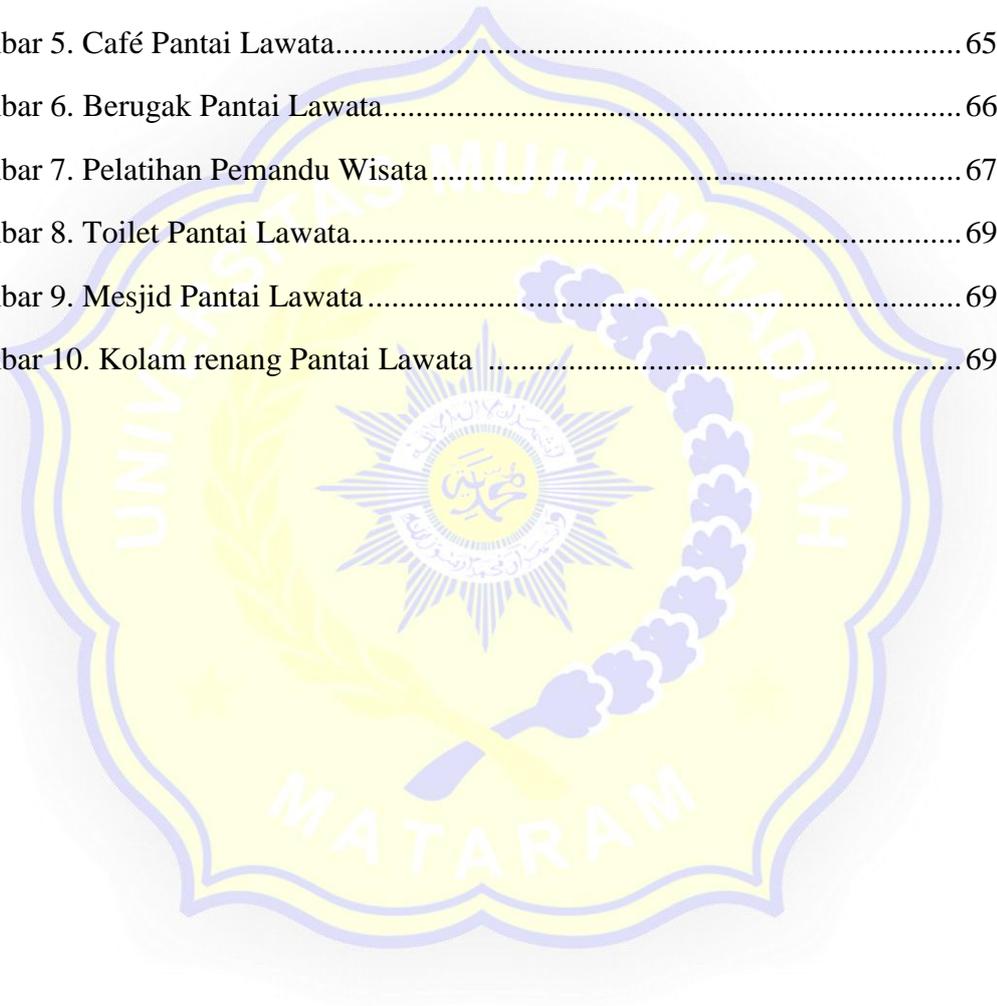


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan Di Pantai Lawata Kota Bima 3 Tahun Terakhir (2018-2020) | 68 |
| Table 2. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 | 69 |
| Tabel 3. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 | 70 |
| Tabel 4. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 | 71 |
| Tabel 5. Profil Responden | 72 |
| Tabel 6. Penghasilan Responden | 74 |
| Tabel 7. Jaminan Kesehatan | 76 |
| Tabel 8. Jaminan Hari Tua | 77 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Kota Bima, Provinsi NTB | 52 |
| Gambar 2. Lambang Dan Motto Kota Bima | 57 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi..... | 60 |
| Gambar 4. Berugak Pantai Lawata..... | 65 |
| Gambar 5. Café Pantai Lawata..... | 65 |
| Gambar 6. Berugak Pantai Lawata..... | 66 |
| Gambar 7. Pelatihan Pemandu Wisata..... | 67 |
| Gambar 8. Toilet Pantai Lawata..... | 69 |
| Gambar 9. Mesjid Pantai Lawata..... | 69 |
| Gambar 10. Kolam renang Pantai Lawata | 69 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara disektor non migas. Adanya krisis ekonomi, sektor pariwisata diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang paling cepat, dikarenakan infrastruktur kepariwisataan tidaklah mengalami kerusakan, hanya saja faktor keamanan yang menyebabkan wisatawan mancanegara mengurungkan kepergiannya ke Indonesia. Hal ini dapat memberikan harapan bahwa pariwisata dapat langsung aktif bilamana wisatawan terutama wisatawan nusantara dapat diaktifkan lagi. Walaupun penghasilan seringkali lebih dikaitkan dengan jumlah wisatawan mancanegara, karena menghasilkan devisa, namun wisatawan nusantara sangat mempengaruhi kegiatan kepariwisataan, termasuk hotel, restoran maupun industri cinderamata. Selain menghasilkan pendapatan bagi negara, pengembangan obyek wisata juga untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Sektor Pariwisata Indonesia, sudah sejak beberapa dekade lalu mempunyai unggulan yang menjanjikan, hanya belum menjadi perhatian serius dan utama. Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi di negara miskin maupun maju, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bisnis lain, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur.

Undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan meliputi:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta imteraksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunukan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya

tarikwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industry pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk pengembangan profesionalitas kerja.

12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan asas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk mewujudkan pariwisata. Keempat pilar tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat memengaruhi semua aspek lain. Pengembangan destinasi dan industry tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemasaran. Dalam hal ini pembangunan pariwisata Indonesia diharapkan dapat:

1. Menjadikan sebagai destinasi wisata nasional/internasional yang berkelanjutan
2. Meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional maupun nasional sehingga jumlah kunjungan akan meningkat
3. Memberikan kesempatan bagi industry kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industry yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi bpengusaha/pemilik usaha, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat luas, dan dari ketiga hal tersebut
4. Menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakan secara efektif.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menjadi landasan berlangsungnya sistem desentralisasi, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berlangsung sejak 1 Januari 2001 yang dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat harus memberikan pembagian kekuasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya sehingga ada tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif yang nantinya akan menjadi sumber daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Hakekat otonomi daerah adalah adanya hak penuh untuk mengurus dan melaksanakan sendiri apa yang menjadi bagian atau kewenangannya, oleh sebab itu otonomi daerah yang ideal adalah

membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Dengan begitu maka daerah berkewajiban untuk mengelola potensi daerah dalam rangka pencapaian tujuan, peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut.

Secara spesifik misi utama dari penerapan otonomi daerah adalah keinginan untuk menciptakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan otonomi daerah maka pengelolaan keuangan daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah, untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahan maka pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber keuangan yang cukup memadai sebagai sebuah kota yang baru terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bima awalnya merupakan kota administratif. Terbentuk pada tanggal 10 April 2002.

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah tujuan wisata yang cukup menjanjikan diantara sekian banyak pilihan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pariwisata merupakan motor penggerak perekonomian di Nusa Tenggara Barat dalam berbagai sektor dan menjadi primadona dalam postur pendapatan asli daerah bagi kabupaten/kota yang ada. Namun demikian, harapan itu seakan sirna begitu saja ketika wabah Covid 19 mulai merambah diawal maret 2020 yang lalu.

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI mulai menentukan langkah persiapan untuk melakukan pemulihan terhadap pariwisata meski masih dalam kondisi pandemi. Sejak wabah Covid-19 masuk ke Indonesia, dunia usaha pada sektor pariwisata pada saat ini mengalami pelemahan menuju titik nol, yang mengakibatkan banyak karyawan atau tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan bahkan tak sedikit juga yang di PHK. Dengan kondisi keterpurukan ini, Dinas Pariwisata NTB pun tidak tinggal diam. Pihaknya terus merancang strategi untuk memulihkan dampak dari pandemi Covid-19, termasuk membuat mitigasi di sektor pariwisata hingga masa pandemi ini berakhir.

Dalam KORANNTB.COM bahwa Kepala Dinas Pariwisata NTB H Lalu Mohammad Faozal, mengatakan secara alur pelaksanaan, pemulihan industri kreatif dan pariwisata dilakukan dengan tiga tahap, di antaranya tahap darurat, tahap pemulihan dan tahap normalisasi. Fase tanggap darurat dimulai sejak bulan Maret hingga akhir Mei. Fase ini merupakan tahap awal yang saat ini sedang berjalan, dimana Dispar NTB telah melakukan upaya untuk menekan dampak buruk yang terjadi pada perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. Salah satu langkah yang di ambil adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif serta pemerintah kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan untuk membantu para pekerja, termasuk mendorong kebijakan fiskal bagi pelaku pariwisata. Ini dilakukan berdasarkan permohonan, pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan

refocusing anggaran untuk membantu para pekerja yang terdampak. Berdasarkan hal ini Nusa Tenggara Barat mendapat bantuan dengan kuota 15 ribu paket bahan makanan pokok bantuan kemenparkrif untuk pekerja yang terdampak.

Kota Bima memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik berupa wisata alam maupun budaya, berada pada banyak titik lokasi destinasi serta tersebar diseluruh wilayah, juga karena kualitas dan daya tariknya yang sangat unik dan beragam contohnya: Pantai Lawata, Pantai Amahami, Pantai Lariti, Museum Asi Mbojo, Mesjid Terapung dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya.

Melalui Undang-Undang tentang Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002, Kota Bima juga merupakan salah satu daerah yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerahnya sendiri. Konsekuensi yang besar ditanggung pemerintah Kota Bima dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, fungsi pemerintahan itu antara lain fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pelaksanaan pembangunan dan fungsi perlindungan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan ketiga fungsi pemerintahan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, dalam situasi ini daerah pasti berusaha menggali dan memajukan potensi yang ada dalam daerahnya guna memakmurkan daerah dan masyarakat setempat mengingat saat ini sudah menjadi otoritas daerah itu untuk mengatur dan membangun daerahnya. Untuk melihat belum optimalnya pengelolaan potensi wisata di Kota Bima pada data tingkat kunjungan wisatawan di Kota Bima.

Berikut disajikan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bima periode 2015-2019, sebagai berikut:

| Wisatawan | Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Bima (orang) | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Wisatawan Mancanegara | 1157 | 779 | 1152 | 1246 | 1015 |
| Wisatawan Domestik | 18011 | 18724 | 36465 | 38765 | 40231 |
| Jumlah | 19168 | 19503 | 37617 | 40011 | 41246 |

Sumber Data : BPS Kota Bima, 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik dari Mancanegara selama 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan walaupun di penghujung Tahun 2019 mengalami penurunan, namun wisatawan domestic justru mengalami peningkatan yang luar biasa sehingga total kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestic selama 5 (lima) tahun sebanyak 157.545 orang.

Adapun Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Kota Bima

Visi

“Mewujudkan Kota Bima sebagai kota jasa budaya dan pariwisata yang maju”

Misi

1. Melestarikan, menjaga, menggali serta, menciptakan potensin wisata dan budaya Bima yang unik, unggul, dan bercirikan lokal.
2. Membentuk karakter SDM yang professional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan jasa budaya dan pariwisata.
3. Menciptakan jasa objek daya tarik wisata, atraksi budaya dan wisata yang memadai dalam memberikan kepuasan pengunjung.

a. Strategi Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Menurut Yoeti (1996, h. 170), wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masingasing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan sarana dan prasarana pariwisata seperti berikut:

1. Fasilitas transportasi
2. Fasilitas akomodasi
3. Fasilitas *Catering Service*
4. Objek dan antraksi wisata
5. Aktivitas rekreasi
6. Fasilitas pembelanjaan
7. Tempat atau took

Semua ini merupakan prasaran dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata sedangkan mengenai prasaran (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

b. Prospek kunjungan wisatawan 5 Tahun terakhir

Porsi dari perjalanan wisata mengidentifikasi potensi kunjungan wisatawan yang dihasilkan dari 5 Tahun terakhir sudah mencakup banyak sekali kunjungan wisata lokal yang melakukan perjalanan wisata di Pantai Lawata. Kajian ini dilakukan untuk melihat potensi wisatawan yang hadir yang melakukan kunjungan ke Pantai lawata, porsi dari perjalanan wisata penduduk dalam 5 Tahun terakhir mampu mengidentifikasi potensi kunjungan wisatawan yang berhasil merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah tersebut.

c. Kontribusi pariwisata terhadap PAD

Di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas bahwa sumber pendapatan daerah itu bagian dari sumbangsih sukarela dari semua penghasil seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sehingga dapat diketahui dalam pengembangan sektor pariwisata di daerah Kota Bima merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Dampak positif bagi masyarakat sekitar

1. Peningkatan dalam pendapatan, secara sederhana dapat diungkapkan bahwa pariwisata menjadi suatu bagian yang penting dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi karena yang diperoleh dari sektor pariwisata bias dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu makro atau nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar.
2. Kesempatan berusaha, kesempatan berusaha dalam bidang pariwisata ini adalah dengan cara membangun usaha kecil seperti café dan rumah makan menjadi modal awal bagi masyarakat sekitar dalam menyambung kehidupan walaupun dalam bidang usaha memiliki peningkatan dan penurunan meskipun demikian tetap berarti bahwa setidaknya konsistensi bidang usaha dalam bertahan di tengah krisisnya ekonomi dan perkembangan pariwisata.
3. Penerapan kesempatan kerja, misalnya membangun bidang-bidang kerja yang sesuai dengan keahlian dalam berdagang misalnya guna untuk mendapatkan uang serta kesempatan kerja dalam bidang pariwisata. Meskipun demikian seluruh lokasi dan seluruh responden menyatakan perkembangan dunia dan kehidupan pariwisata memberikan kontribusi yang cukup berperan dalam peningkatan usaha kerja.

Pemerintah Daerah Kota Bima dihadapkan dengan dua masalah sekaligus yang pertama adalah kenyataan bahwa pembiayaan untuk menjalankan pemerintahan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik

sangat besar, di sisi lain daerah tersebut merupakan daerah yang minim sumber daya alam sehingga pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Bima harus dapat mengembangkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bima. Potensi pariwisata di Kota Bima apabila dikembangkan menjadi transit wisata alternatif maka akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, terbukanya kesempatan berusaha, serta mengurangi jumlah angka pengangguran. PAD dari sektor pariwisata di Kota Bima terus mengalami peningkatan mencapai 300 persen. Pada tahun 2018 lalu, hanya berkisar Rp 39 juta, dan tahun 2019 mencapai Rp 200 juta. Untuk merealisasikan tujuan tersebut banyak usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan warga masyarakat di Kota Bima. Salah satu yang dikembangkan oleh pemerintah adalah sektor pariwisata dimana salah satunya adalah obyek wisata alam. Dari banyaknya wisata alam di Bima, ada beberapa obyek daya tarik wisata yang cukup di kenal dan diperkenalkan sebagai obyek daya tarik wisata alam Kota Bima salah satunya adalah Pantai Lawata.

Pantai Lawata merupakan salah satu kawasan wisata alam pantai yang terdapat di Kota Bima dan sudah sejak tahun 1961 Pantai Lawata menjadi sebuah obyek wisata atau tempat piknik bagi masyarakat Bima. Pantai Lawata terletak di Kelurahan Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dengan jarak 5 km dari pusat Pemerintahan kota Bima. Di Pantai Lawata terdapat bukit-bukit

kecil yang memiliki dua buah gua kecil, dengan panorama alam yang indah serta pantainya sangat jernih sebagai tempat yang bagus untuk olahraga air atau sebagai tempat permandian air laut. Kota Bima Panjang pantai kira-kira setengah kilometer yang dikelilingi perbukitan yang indah. Di bawah bukit berbatu terdapat sebuah goa peninggalan Jepang Dahulu tempat ini merupakan tempat peristirahatan bagi para bangsawan Bima dan kemudian menjadi tempat rekreasi andalan masyarakat yang selalu ramai dikunjungi.

Faktor Pendukung dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Lawata adalah keanekaragaman alam dan kekayaan seni budaya yang dimiliki Wisata Pantai Lawata untuk dikembangkan dan dikelola menjadi sebuah daya tarik wisata, pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan fasilitas dan perbaikan infrastruktur secara merata di Kota Bima terlebih akses-akses menuju Wisata Pantai Lawata.

Faktor penghambat dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Lawata adalah, kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata. Masyarakat cenderung konservatif dan menganut nilai-nilai tradisional yang secara tegas menolak adanya pengembangan pariwisata di daerahnya.

Pemerintah Kota Bima terus membenahi Pantai Lawata untuk menjadi salah satu obyek wisata pantai favorit di kota Bima dengan membangun berbagai sarana dan prasarana wisata seperti rumah makan terapung, perlengkapan berenang, panggung hiburan rakyat serta sederetan penataan lainnya. Sarana pariwisata Lawata Beach Hotel Restaurant and Swimming

Pool telah dibangun sejak dulu. Tempat ini dulu menjadi hotel yang selalu ramai dikunjungi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Fasilitas pariwisata yang ada di Pantai Lawata berupa shelter dan panggung hiburan yang akan menampilkan berbagai macam hiburan dan kesenian rakyat. Di areal sekitar Pantai Lawata, di atas bukit yang menghadap ke arah pantai juga telah dibangun rumah makan dan tempat lesehan yang menyajikan berbagai makanan daerah Bima. Pemandangan Pantai Lawata menarik untuk dikembangkan. Pantai yang asri dengan airnya yang tenang sangat cocok untuk olahraga air. Panorama keindahan Teluk Bima yang tenang terlihat jelas jika berdiri di atas bukit Pantai Lawata. Memandang ke arah barat daya terlihat Pulau Kambing dan Pelabuhan Bima. Di sebelah utara, hamparan pohon kelapa dari perkebunan penduduk, bukit yang menjulang, dan keindahan taman kota Ama Hami menambah daya tarik Pantai Lawata. Tempat ini sangat ideal untuk dikembangkan wisata bahari karena air lautnya tenang. Jenis atraksi yang bisa dikembangkan antara lain memancing, menyelam, berperahu, berselancar, dan berlayar menuju Pulau Kambing, Desa Kolo, dan Wadu Pa'a (batu pahat yang menjadi situs peninggalan pemujaan agama Budha di Desa Sowa Kabupaten Bima).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengembangan Pantai Lawata sebagai obyek wisata unggulan di Kota Bima ?, yang meliputi:

- a. Strategi Pengembangan Pariwisata
 - b. Prospek, kunjungan wisatawan 5 Tahun terakhir
 - c. Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD
 - d. Dampak positif bagi masyarakat sekitar
2. Faktor apa saja yang menjadi Pendukung dan Penghambat Pengembangan Obyek Wisata Pantai Lawata di Kota Bima ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengembangan Pantai Lawata Sebagai Obyek Wisata Unggulan di Kota Bima, yang meliputi:
 - a. Strategi Pengembangan Pariwisata
 - b. Prospek, Kunjungan Wisatawan 5 Tahun Terakhir
 - c. Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD
 - d. Dampak positif bagi masyarakat sekitar
- 2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan obyek wisata yang ada di Pantai Lawata Kota Bima.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat ada tiga yaitu manfaat akademis, teoritis, dan manfaat secara praktis :

1) Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data penyusunan skripsi, sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Studi

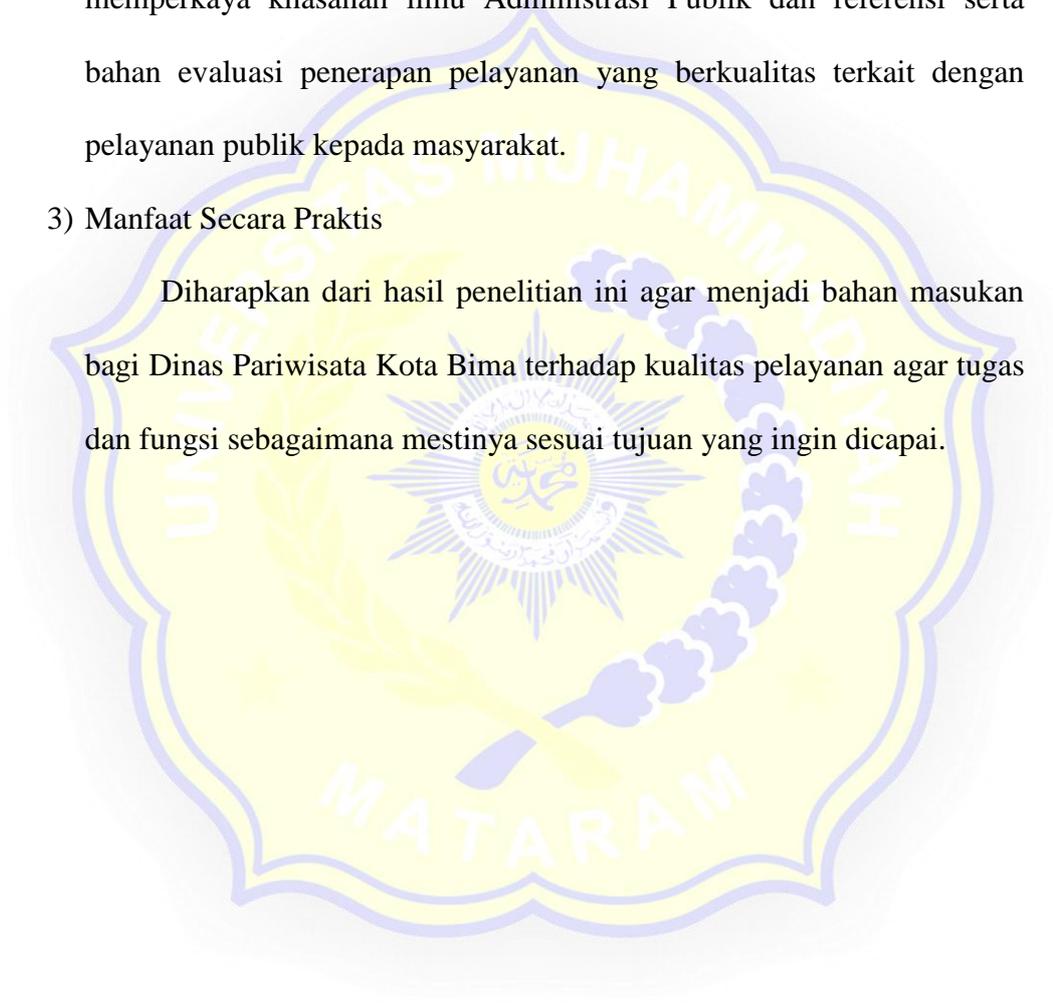
Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2) Manfaat Secara Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu Administrasi Publik dan referensi serta bahan evaluasi penerapan pelayanan yang berkualitas terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat.

3) Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini agar menjadi bahan masukan bagi Dinas Pariwisata Kota Bima terhadap kualitas pelayanan agar tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sesuai tujuan yang ingin dicapai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha untuk memajukan kegiatan pariwisata sehingga tercipta suatu usaha kondisi pariwisata yang dapat menghasilkan devisa. Pengembangan pariwisata, khususnya pengembangan pariwisata pantai, tidak hanya membenahi obyek wisata alam dan perairan atau hanya melakukan pengembangan akomodasi dan restoran, tetapi jauh lebih luas dari itu. Wisatawan yang datang tetap memerlukan fasilitas, angkutan, atraksi wisata air yang menarik, pelayanan, cinderamata, suasana aman, dan lain-lain.

Ditinjau secara nasional, menurut Soekadijo (1996:10) tujuan pengembangan pariwisata diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan beberapa sektor, antara lain:

1. Mengubah atau menciptakan usaha-usaha baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata misalnya: usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lainlain) yang memerlukan perluasan beberapa industri kecil seperti industri kerajinan tangan.
2. Memperluas pasar barang-barang lokal.
3. Memberi dampak positif pada tenaga kerja, karena pariwisata dapat memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di hotel atau tempat penginapan, usaha perjalanan, industri kerajinan tangan dan cinderamata serta tempat-tempat penjualan lainnya).

4. Mempercepat sirkulasi ekonomi dalam usaha negara kunjungan dengan demikian akan memperbesar *multiplier effect*.

Pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah pengunjung, kemudahan transportasi, ketersediaan fasilitas pendukung (seperti hotel, restoran, sarana hiburan), adanya promosi dan daya tarik dari atraksi wisata yang ada. Atraksi wisata dan fasilitas atau kenikmatan merupakan dasar utama dari pariwisata. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka wisatawan tidak akan mempunyai motivasi atau keinginan untuk mengunjungi obyek wisata tersebut (Robinson, 1976:38). Oleh karena itu agar pariwisata benar-benar menjadi salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan (*an economically sustainable area/ecosystem*), maka pariwisata harus di bangun dengan strategi yang terencana dan bervisi jangka panjang:

1. Perlu ditetapkan berbagai peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu perlu diambil tindakan yang tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini penting karena pengalaman pada beberapa daerah tujuan wisata (DTW), sama sekali tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar. Contoh kasus: pengelolaan DTW di Pantai Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT.

Pada DTW tersebut masyarakat tidak berkesempatan untuk terlibat, baik untuk menjual hasil-hasil pertanian, kerajinan maupun menjadi karyawan di tempat itu.

3. Kegiatan promosi yang dilakukan harus beragam, selain dengan mencanangkan cara kampanye dan program Visit Indonesia seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kegiatan promosi juga perlu dilakukan dengan pembentuk system informasi yang handal dan membangun kerjasama yang baik dengan pusat-pusat informasi pariwisata pada negara-negara lain, terutama negara-negara yang potensial.
4. Perlu menentukan DTW-DTW utama yang memiliki keunikan dibanding dengan DTW lain, terutama yang bersifat tradisional dan alami. Kebetulan saat ini obyek wisata yang alami dan tradisional menjadi sasaran utama para wisatawan asing. Obyek ini masih banyak ditemukan di luar Jawa, misalnya di daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Papua dan lain-lain.
5. Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan pemerintah daerah setempat, dengan sistem yang jujur, terbuka dan adil. Kerjasama ini penting untuk lancarnya pengelolaan secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai. Selain itu kerjasama di antara penyelenggara juga perlu dibangun. Kerjasama di antara agen biro perjalanan, penyelenggara tempat wisata, pengusaha jasa akomodasi dan komponen-komponen terkait lainnya merupakan hal sangat penting bagi keamanan kelancaran dan kesuksesan pariwisata.

6. Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua DTW yang ada di seluruh Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan perhatian yang sama kepada semua DTW. Perhatian terhadap DTW yang sudah mandiri hendaknya dikurangi dan memberikan perhatian yang lebih terhadap DTW yang memerlukan perhatian lebih.
7. Menggugah masyarakat sekitar DTW agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memasarkan produk-produk lokal serta membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengadaan modal bagi usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan.
8. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. Pengadaan dan perbaikan jalan, telephone, angkutan, pusat perbelanjaan wisata dan fasilitas lain disekitar lokasi DTW sangat diperlukan.

Dengan memperhatikan beberapa saran ini kiranya dapat membantu bagi penyelenggaraan pariwisata yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Tentunya saran-saran tersebut tidak berlaku untuk semua DTW, hal itu sangat tergantung pada kebutuhan DTW masing-masing yang memiliki permasalahannya sendiri dari waktu ke waktu dan lingkungan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, maka dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Wilayah daratan dan lautan yang luas dengan berbagai keragaman dan keunikannya merupakan potensi yang dapat diandalkan bagi kemajuan pariwisata.

Strategi dan program pengembangan pariwisata, Pula juga peneliti mengutip hasil penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Pattaray (2015) membahas tentang potensi kawasan Gili Balu sebagai area konservasi yang memiliki ekosistem pulau kecil, pesisir pantai, lingkungan bawah laut serta budaya masyarakat Poto Tano Sumbawa Barat, persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengembangan pariwisata sedangkan perbedaanya yaitu Variabel bebas mulai dari proses serta pelayanan.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Andi Handoko (2015) membahas tentang Kajian Obyek Wisata Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen, persamaan dengan penelitian saat ini yaitu membahas mengenai survei kepuasan pengunjung sedangkan perbedaanya yaitu Variabel yang digunakan adalah mengenai survei kepuasan pengunjung.

B. Pengertian Pariwisata dan Pengembangan Wilayah

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain dan bertujuan untuk bersenang-senang dengan menikmati objek-objek wisata selama perjalanan. Bentuk dari perjalanan tersebut harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi. Adapun orang melakukan perjalanan tersebut tidak bermaksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Dalam era otonomi daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan maka diperlukan suatu model pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas serta karakteristik wilayah masing-masing, sehingga diperlukan upaya untuk menggali potensi daerah sebagai dasar dalam perumusan strategi pembangunan. Menurut Tantra (2014) dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diperlukan sebuah kerangka teoritik, yaitu paradigma berpikir yang memperhatikan ruang secara realistic. Ruang tidak berarti fisik, tetapi juga lingkungan sosial budaya dalam arti luas. Pola dasar pembangunan yang memperhatikan ruang (fisik dan non fisik) secara holistic yaitu ruang sebagai kesatuan wilayah administratif, ekonomi, historis dan empiris. Dengan demikian pola pembangunan dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi lingkungan dan manusianya.

Pengembangan destinasi wisata dalam kerangka pembangunan daerah memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam tataran makro, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tataran mikro. Sehingga pengembangan pariwisata daerah haruslah juga memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang baik dapat mendorong terbukanya peluang kerja, pengembangan produk lokal, serta kesempatan pendidikan dan pelatihan masyarakat. Secara harafiah pengembangan diartikan sebagai proses atau cara. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2005: 538) Mendefinisikan pengembangan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik, maju sempurna dan berguna, sehingga pengembangan merupakan suatu proses/aktivitas memajukan sesuatu yang dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa dengan meremajakan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi menarik dan lebih berkembang.

Grady dalam Suwanto (2002) menjelaskan bahwa kriteria pengembangan pariwisata haruslah selalu melibatkan masyarakat lokal sehingga pengembangan yang dilakukan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Pengembangan juga harus diarahkan agar tidak merusak nilai-nilai dalam masyarakat, serta meminimalisasi dampak melalui penyesuaian program dengan kapasitas sosial masyarakat. Kriteria tersebut sejalan dengan konsep dasar pariwisata berbasis masyarakat serta pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal yang sama juga tertuang dalam kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan. Dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2009

disebutkan bahwa prinsip dasar pengembangan pariwisata agar berkelanjutan yaitu: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta melestarikan alam lingkungan dan budaya.

Menurut Spillane (1989), dampak pariwisata terhadap suatu wilayah adalah cukup kompleks. Untuk itu pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga semua segi pengembangan pariwisata memperhitungkan pula untung rugi apabila di banding dengan pembangunan sektor lain. Keuntungan yang diharapkan biasanya adalah membuka kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, menambah devisa negara, merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia dan menunjang gerak pembangunan daerah. Sedangkan kerugian antara lain lingkungan menjadi rusak, pariwisata beralih ke tangan asing, pencarian benda-benda kuno, berubahnya tujuan kesenian rakyat dan upacara adat tradisional, timbulnya industri seks, dan lain-lain.
2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan kedalam pola dan program pembangunan semesta ekonomi, fisik dan sosial suatu Negara.
3. Pengembangan pariwisata dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat. Dari berbagai penjelasan, maka dapat dilihat hubungan dalam memberikan konsep secara operasional tentang pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang dimaksud dalam pengembangan wisata pantai di Kota Bima merupakan sebuah

proses untuk mengarahkan kegiatan pariwisata menjadi lebih baik, dengan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat bagi sumber daya yang terkait di dalamnya.

4. Pengembangan pariwisata harus sadar “lingkungan”. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan yang telah ada.
5. Pengembangan pariwisata dapat mengarahkan perubahan-perubahan sosial yang positif.
6. Penentuan tata cara pelaksanaan harus disusun sejelas-jelasnya dengan pencatatan (monitoring) terus menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap suatu masyarakat dan lingkungan kehidupan masyarakat.

Menurut Mill dalam bukunya yang berjudul “The Tourism, International Business” (2000, p.168-169), menyatakan bahwa : “pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut”.

Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan rumah

yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cinderamata yang memiliki kekhasan dari obyek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di obyek wisata tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

C. Pariwisata dan Dampak yang Ditimbulkannya

Menurut (Cohen, Erik, 1994: 112) Meskipun pariwisata juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara politik, keamanan, dan sebagainya, dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan

1. Dampak positif obyek wisata terhadap social ekonomi secara formal, para ahli membedakan dampak social ekonomi yang terjadi karena kegiatan pariwisata terdiri dari efek langsung (*Direct Effects*), efek tidak langsung (*Indirect Effect*) induksi (*Induced Effect*). Sementara itu efek tidak langsung dan efek induksi kadang-kadang disebutnya sebagai efek sekunder yang menyertai efek langsung selaku efek primer (*Primary Effect*).

Analisis dampak sosial ekonomi kegiatan pariwisata lazimnya berfokus pada perubahan penjualan, penghasilan dan penempatan tenaga kerja di daerah bersangkutan yang terjadi akibat kegiatan pariwisata. Secara

nyata, kegiatan pariwisata memberikan manfaat pada penjualan, keuntungan, lapangan kerja, pendapatan pajak dan penghasilan dalam suatu daerah.

a. Peningkatan pendapatan negara dalam valuta asing atau devisa, sehingga akan bisa memperkuat neraca pembayaran. Bahwa pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran merupakan perbandingan antara semua mata anggaran yang diterima oleh negara dari negara-negara asing sebagai pemasukan dan semua anggaran yang harus dibayar kepada negara-negara asing sebagai pengeluaran. Karena wisatawan itu membelanjakan uang yang diterima di negara yang dikunjunginya, maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan mancanegara itu merupakan faktor yang penting agar neraca pembayaran menguntungkan. Inilah artinya, kalau dikatakan bahwa pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran. (Nyoman Pendit S, 1994: 65). Akan tetapi penerimaan dari pariwisata menambah besarnya volume uang didalam masyarakat, dan ini dapat menimbulkan inflasi kalau produksi komoditi didalam negeri tidak bertambah. Inilah sebabnya maka dikawasan pariwisata harga-harga biasanya lebih mahal dari pada di daerah daerah. Banyaknya barang tidak dapat mengimbangi laju pertambahan uang yang beredar.

b. Penambahan pendapatan negara dari penerimaan pajak. Banyaknya wisatawan yang berkunjung tentunya banyak juga wisatawan yang membelanjakan uangnya untuk membeli barang yang ada di daerah

sekitar. Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah mendapat pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh para pedagang yang barangnya laku terjual. Semakin banyak wisatawan berkunjung maka semakin banyak pula yang membeli barang, maka pajak yang diterima oleh Negara juga semakin banyak. Pajak yang telah dibayarkan oleh pedagang kemudian akan dikelola untuk dapat digunakan dalam pembangunan daerah seperti pengembangan objek daerah wisata dan lain sebagainya.

c. Menimbulkan adanya dampak pergandaan (*multiplier effect*). Bahwa sejumlah uang yang diterima masyarakat akan dikeluarkan lagi, yang menerima belakangan ini akan mengeluarkan lagi dan seterusnya. Akibatnya di dalam sosial ekonomi masyarakat akan terjadi pertambahan uang berganda. Inilah yang dimaksud dengan dampak pergandaan (*multiplier effect*). Dikarenakan adanya “kebocoran-kebocoran” yaitu sebagian dari uang tidak ikut beredar di dalam masyarakat karena ditabung atau karena dibelanjakan untuk barang atau jasa import, sehingga bagian uang tersebut mengalir ke masyarakat luar negeri. Jadi peredaran uang itu berjalan terus tetapi tidak tanpa batas, karena pada suatu saat dampak pergandaan itu begitu kecil sehingga praktis nihil.

d. Terbentuknya kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kesempatan berusaha yang langsung untuk menerima kebutuhan wisatawan meliputi usaha akomodasi, restoran, biro perjalanan, pusat perbelanjaan.

Sedangkan lapangan usaha yang tidak langsung seperti : kerajinan, industri pakaian, industri olahraga dan lapangan usaha yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Luasnya kesempatan dalam berusaha berarti akan membuka lapangan kerja karena sektor pariwisata merupakan sektor padat karya yaitu kegiatannya membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak. Kecuali itu pariwisata juga memerlukan tenaga kerja untuk keperluan pemberian jasa perorangan, seperti pramuwisata, instruktur, misalnya untuk main sky, pramuria di club malam, pelayan di bar, pengangkut barang, sopir dan sebagainya. Ini semua membuat tenaga kerja yang diperlukan di bidang pariwisata menurut perbandingan lebih banyak dari pada di usaha-usaha lain. Banyak tenaga kerja di bidang pariwisata itu memerlukan pendidikan dan latihan khusus, sehingga menimbulkan lapangan kerja di bidang pendidikan.

- e. Mendorong pembangunan daerah. Daerah industri bukan daerah yang biasanya berkembang menjadi kawasan pariwisata. Daerah-daerah di mana terdapat atraksi wisata ialah daerah-daerah terpencil dengan penduduk dan kebudayaan terasing, pantai laut tanpa penduduk, atau dengan kegiatan penangkapan ikan sekadarnya, pegunungan dengan pemandangan dan hawa yang sejuk dan sebagainya. Semuanya daerah di mana boleh dikatakan tidak terjadi pembangunan. Karena di daerah itu terdapat atraksi wisata, maka daerah-daerah tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata. Kalau hal ini terjadi pada

perkembangan kepariwisataan di daerah, maka akan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan dan membangun sarana dan prasarana yang diperlukan seperti:

1) lingkungan

Selain itu juga akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan obyek dan daya tarik wisata. Usaha sarana akomodasi, usaha jasa biro perjalanan, restaurant dan rumah makan.

Menurut Cohen (1984) Dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu:

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja
- 4) Dampak terhadap harga-harga
- 5) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
- 6) Dampak terhadap kepemikiran dan control
- 7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

2. Disamping pengembangan pariwisata mempunyai manfaat yang positif bagi pembangunan juga mempunyai berbagai macam dampak negatif, antara lain:

- a. Mahalnya harga barang atau jasa pelayanan

- b. Timbulnya sikap mental materialisme Dampak positif obyek wisata terhadap sosial budaya

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata

Dalam meningkatkan kegiatan kepariwisataan, pemerintah telah mencanangkan tahun sadar wisata nasional sehingga masyarakat diharapkan dapat menyambut dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Kepariwisataan masih merupakan suatu hal yang baru sehingga masih banyak terlihat kekurangan kekurangan dalam upaya menunjang kegiatan pariwisata.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata yang sifatnya mendorong dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Motivasi pokok para wisatawan

Adapun motivasi pokok wisatawan datang mengunjungi suatu daerah wisataa dalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan dan permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri khas tertentu yang menarik wisatawan seperti: keindahan alam, iklim atau cuaca, kebudayaan sejarah, kesukuan, kemudahan dalam hal perjalanan ke tempat tertentu.

2. Situasi dan kondisi negara atau daerah tujuan wisata

Faktor situasi dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik, ekonomi, serta kemanan negara atau daerah tujuan wisata juga sangat diperhatikan oleh wisatawan yang ingin melakukan kunjungan wisata ke suatu daerah. mereka berharap akan merasa aman, santai, dan senang saat berwisata di tempat tersebut. Oleh karena itu negara atau daerah yang

bersangkutan harus memperhatikan hal ini agar permintaan pariwisata semakin bertambah.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan nyata dan gaya hidup akan mempengaruhi permintaan pariwisata. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan dan gaya hidup, maka semakin besar permintaan akan rekreasi dan manfaat lain dari pariwisata.

4. Harga

Yang termasuk di sini adalah ongkos transportasi, sewa kamar hotel, harga barang untuk oleh-oleh (*souvenir*), dan lain sebagainya. Faktor ini juga perlu diperhatikan, karena pengunjung (wisatawan) pada umumnya bukan merupakan orang-orang kaya akan tetapi tergolong sebagai orang-orang yang berpenghasilan sedang. Dimana pada umumnya mereka ingin segala sesuatunya terasa lebih baik dan dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan permintaan pariwisata, maka hendaknya harga-harga yang ditetapkan tidak sampai melebihi (lebih mahal dari) negara atau daerah lain.

5. Keramah-tamahan

Penduduk Masyarakat Indonesia dikenal dengan kermah-tamahannya yang perlu terus dipertahankan karena hal ini sangat penting dan sangat berpengaruh bagi ketenangan dan betahnya wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata.

6. Kegiatan Pemasaran Kepariwisata (Promosi Wisata)

Untuk meningkatkan kepariwisataan perlu dilakukan kegiatan pemasaran kepariwisataan. Bids berbentuk brosur perjalanan wisata, *postcard* dan bentukbentuk lain yang di edarkan di dalam dan di luar negeri. Selain itu juga hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang biro-biro luar negeri dengan maksud memperkenalkan daerah wisata.

7. Misi-misi Kebudayaan

Negara kita yang kaya akan aneka kebudayaan tardisional, perlu diperkenalkan pada masyarakat Internasional salah satunya dengan cara mengirim misi-misi kebudayaan ke luar negeri. Juga untuk memperkenalkan lokasi atau daerah-daerah objek wisata, dalam hal ini duta-duta besar perlu lebih giat dalam berperan untuk mengiatkan misi-misi kebudayaan.

8. Masalah Fasilitas

Masalah fasilitas memegang peranan penting dalam pengembangan pariwisata, karena betapa pun bagusya daerah tujuan pariwisata tersebut dan bagaimanapun efisien dan gencarnya promosi wisata yang dilakukan, namun wisatawan pasti akan sangat kecewa bila tidak menemukan fasilitas seperti yang mereka inginkan. Kekecewaan ini dapat berakibat panjang karena wisatawan tersebut akan menceritakannya kepada calon wisatawan yang lain yang merupakan rekan se kota atau senegaranya, hal ini bisa saja berantai dan berakibat luas. Oleh karena itu, baik dari segi fasilitas

kepariwisataan yaitu terdiri dari berbagai jasa-jasa yang memberi kemudahan untuk menikmati daerah tujuan wisata, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Selain itu, urusan keimigrasian dan bea cukai harus menyediakan pelayanan yang sebaik mungkin, karena kesan pertama sangat berpengaruh bagi wisatawan untuk perjalanan selanjutnya.

Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, masih ada beberapa hal pengembangan dan pembangunan yang menunjang sektor pariwisata yaitu:

- a. Pemeliharaan objek-objek wisata yang sudah ada
- b. Pembangunan jala-jalan atau transportasi lainnya untuk lebih mudah dalam mencapai lokasi objek
- c. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan pada daerah objek wisata
- d. Menjaga mutu kesenian daerah agar benar-benar tetap orisinal sehingga dapat merangsang para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata.

Dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan agar perkembangan pariwisata di Indonesia akan dapat memenuhi sasaran, sehingga peranan pariwisata nantinya benar-benar yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, sekaligus juga dapat menambah pendapatan masyarakat.

E. Peran Pariwisata dalam Pembangunan

1. Perekonomian

Menurut Spilane (1987:21), dalam arti luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Menurut Boediono (1981:9) bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang, yang menekankan pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada saat tertentu, melainkan dilihat dari aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Dalam kaitannya dengan output perkapita pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Dengan demikian untuk menganalisis suatu pertumbuhan ekonomi, teori yang digunakan harus mampu menjelaskan GDP total dan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang dalam suatu pertumbuhan ekonomi, juga perlu dilihat untuk memperhitungkan apakah ada kenaikan output per kapita dalam jangka waktu atau tidak. Jika terjadi kenaikan, maka terjadi pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya.

Jadi dari dua teori diatas hubungan antara Ekonomi Kepariwisata dengan Ekonomi masyarakat bila suatu daerah di bangun tempat-tempat wisata maka secara tidak langsung penduduk sekitar akan mengalami dampak pertumbuhan ekonomi, karena tempat-tempat wisata tersebut akan

menarik lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata tersebut.

Pariwisata berperan dapat membawa dampak pada kehidupan masyarakat, hal ini dapat diketahui dengan lima, yaitu :

- a. Pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan perbandingan antara semua mata anggaran yang diterima oleh negara dari negara-negara asing sebagai pemasukan dan semua anggaran yang harus dibayar kepada negara-negara asing sebagai pengeluaran. (yoeti, 1996:22)
- b. Pariwisata menyebabkan pembangunan daerah non industri. Daerah-daerah dimana terjadi atraksi wisata ialah daerah terpencil, boleh dikatakan pembangunan didaerah tersebut belum maksimal. Hal itu dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata dan terjadilah pembangunan, seperti dibangunnya hotel, tempat makan, toko-toko, dan sebagainya
- c. Pariwisata menciptakan lapangan kerja. Industri pariwisata dengan produknya adalah merupakan usaha yang padat karya. Seperti hotel yang membutuhkan tenaga kerja dalam pengoperasiannya. Wisatawan memerlukan makan dan minum, secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja pada sektor pertanian. Banyak tenaga kerja di sektor pariwisata yang membutuhkan pendidikan dan latihan khusus, sehingga menimbulkan lapangan kerja di bidang pendidikan, dan seterusnya.

d. Dampak pergandaan. Uang baru yang masuk ke dalam suatu perekonomian dalam bentuk apapun, investasi, pemberian, atau pembelanjaan pemerintah, kiriman uang dari pekerja di luar negeri, atau pengeluaran wisatawan mendorong perekonomian, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, karena ia dibelanjakan kembali.

2. Pembangunan infrastruktur

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah. Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni daya tarik wisata "*attractions*" khususnya daya tarik wisata *man-made*, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengemasan.

Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi "*acesable*" akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata "*Amenities*" seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan. Pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan

infrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk local dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat local akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

Kegiatan pariwisata yang berkembang dituntut untuk dapat menyediakan infrastruktur penunjang yang memadai. Menurut Heraty dalam *Tourism Planning*, ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha pengembangan pariwisata seperti yang telah dikemukakan oleh Gunn dalam konsep destinasi, salah satu aspek yang sangat penting untuk mendukung suatu tujuan wisata adalah ketersediaan sarana prasarana. Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata dalam konteks pengembangan Indonesia mengacu juga pada pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Dalam konteks pariwisata, sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan selama berada di tempat tujuannya. Pengertian infrastruktur dalam konteks pariwisata adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa suatu sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah. Ashworth (1992) menyebutkan bahwa salah satu aspek utama yang dapat mendukung perkembangan pariwisata adalah ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata.

Secara umum, berdasarkan Page (1995) dalam *Urban Tourism*, fasilitas utama penunjang kegiatan pariwisata dapat dibedakan menjadi :

- a. Sarana Akomodasi
- b. Penyedia jasa makanan
- c. Sarana perbelanjaan
- d. Berbagai sarana pendukung lainnya

Namun dalam penyediaannya di lapangan, hal tersebut masih menjadi salahsatu permasalahan dalam kepariwisataan di Indonesia karena dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara *supply* dan *demand*. Dalam hubungannya dengan infrastruktur, berkembangnya kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang dimaksud diantaranya berupa munculnya atau dibangunnya berbagai infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, namun juga dapat memberikan beban yang berlebih bagi infrastruktur perkotaan yang telah tersedia. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang baik dirasa masih sangat diperlukan.

3. Regulasi

Karakteristik pembangunan pariwisata bersifat multisektoral dan multidimensi sehingga pembangunan kepariwisataan di daerah tujuan wisata dituntut melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai institusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pariwisata, Asosiasi Profesi Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan

Tinggi, Masyarakat, Investor/Developer, Pers dan Media massa. Dengan karakteristik pembangunan pariwisata yang bersifat multi sektor dan multi dimensi, dibutuhkan perangkat yang secara langsung dapat menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan di daerah dapat terjaga.

F. Upaya Memaksimalkan Peran Pariwisata dalam Pembangunan

Menurut Suwanto (2004), Upaya pengembangan pariwisata yang dilihat dari kebijaksanaan dalam pengembangan wisata alam, dari segi ekonomi pariwisata alam akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Mengembangkan pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarannya. Untuk itu diperlukan evaluasi pendapat yang teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut. Banyak menyatakan bahwa pariwisata alam yang berbentuk ekoturisme belum berhasil berperan sebagai alat konservasi alam maupun untuk mengembangkan perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan dana pengembangan kegiatannya. Pengelolaan kawasan wisata alam banyak menggunakan dana dari pendapatan pariwisata dari pengunjung sebagai mekanisme pengembalian biaya pengelolaan dan pelestarian kegiatan pariwisata alam belum tercapai secara optimal.

Situasi dan kondisi sosio-ekonomi Indonesia saat ini, yang memperlihatkan bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian dan lapangan pekerjaan lainnya serta semakin rusaknya lingkungan akibat kegiatan manufaktur dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang mengeksploitasi

sumber daya alam, maka pariwisata perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber produksi andalan. Sektor pariwisata selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga merangsang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dimengerti karena pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran atau obyek wisata.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan Dalam mendukung pengembangan pariwisata, kebijakan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

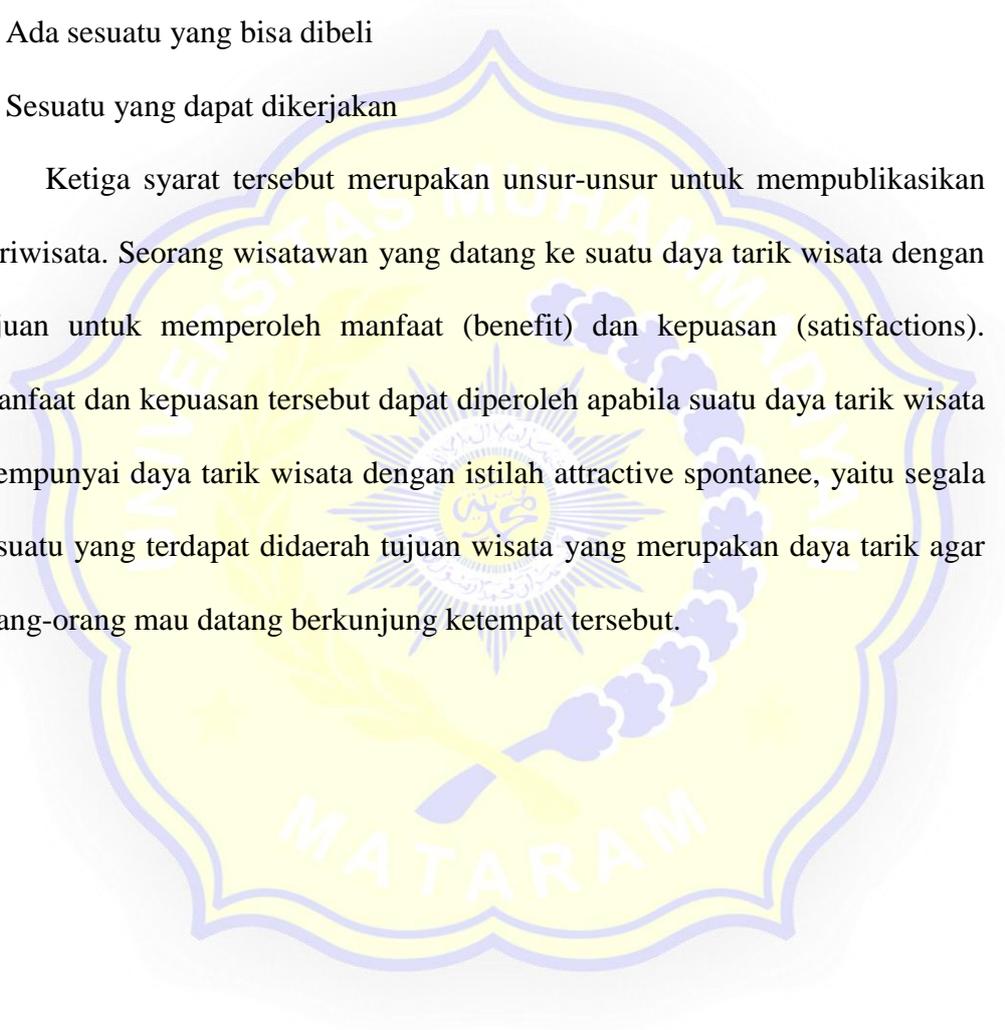
1. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penatan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah
3. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai prime mover dan secara interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lainnya.
4. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stekholder.

Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif sampai dengan kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa).

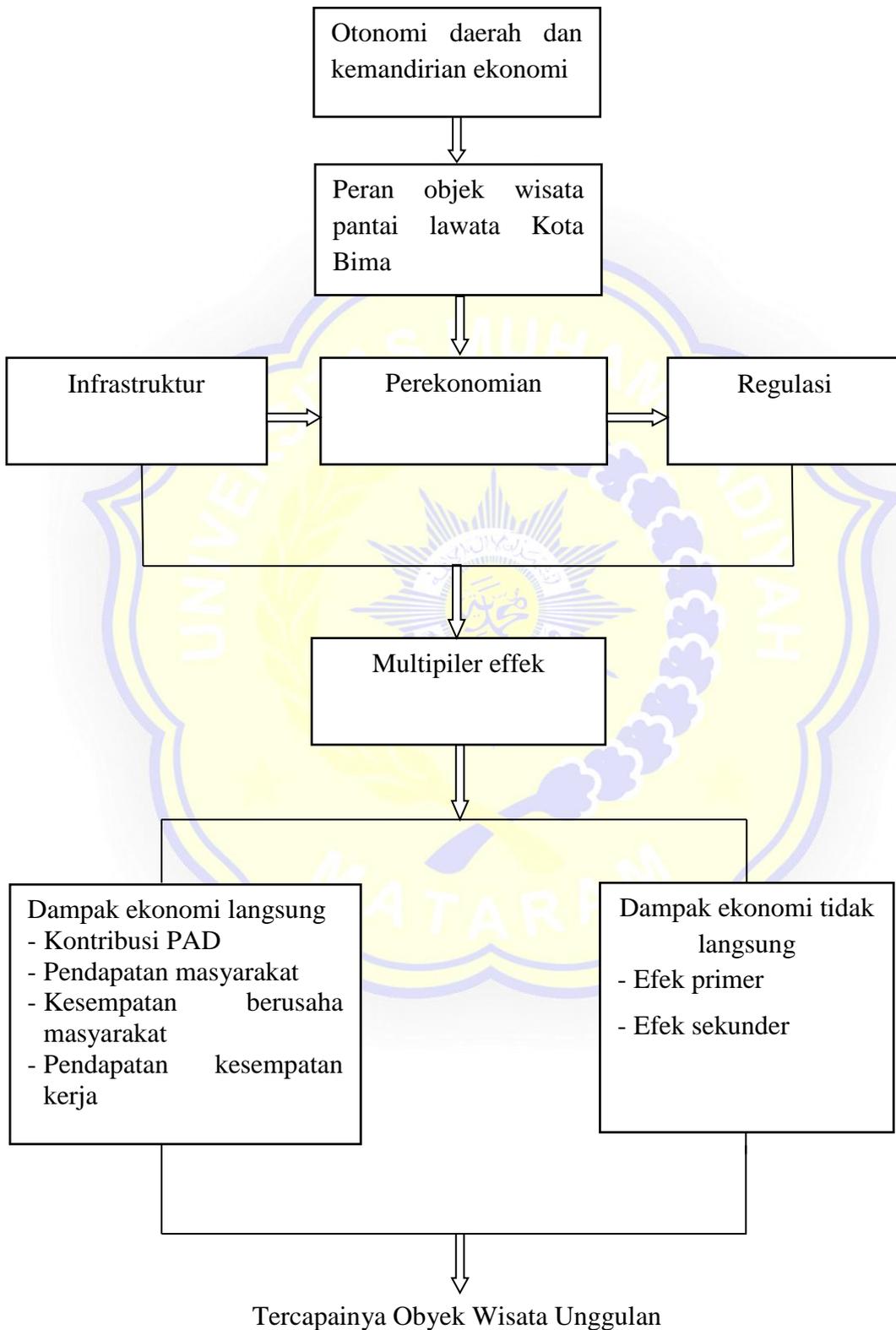
Agar suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik, disamping harus ada objek dan atraksi wisata, suatu daya tarik wisata harus mempunyai 3 syarat daya tarik yaitu:

- a. Ada sesuatu yang bisa dilihat
- b. Ada sesuatu yang bisa dibeli
- c. Sesuatu yang dapat dikerjakan

Ketiga syarat tersebut merupakan unsur-unsur untuk mempublikasikan pariwisata. Seorang wisatawan yang datang ke suatu daya tarik wisata dengan tujuan untuk memperoleh manfaat (benefit) dan kepuasan (satisfactions). Manfaat dan kepuasan tersebut dapat diperoleh apabila suatu daya tarik wisata mempunyai daya tarik wisata dengan istilah attractive spontanee, yaitu segala sesuatu yang terdapat didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ketempat tersebut.



G. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode survey deskriptif adalah suatu model penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Dan penelitian deskriptif menggunakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Metode Penelitian kualitatif, yang dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana Pengembangan Wisata Pantai Lawata Sebagai Obyek Wisata Unggulan di Kota Bima. Dengan demikian, melalui penelitian kualitatif peneliti berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Pengembangan Wisata Pantai Lawata Sebagai Obyek Wisata Unggulan di Kota Bima.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah di Dinas Pariwisata Kota Bima dan Pantai Lawata Kelurahan Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari tahun 2021 sampai data terpenuhi.

C. Pemilihan Informasi/Responden

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling, dan snowball sampling. Dalam penelitian menggunakan teknik penelitian purposive. Dan mewawancarai staf atau pekerja yang ada di dinas Pariwisata. (Usman, 2009:56) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam focus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian meliputi (1) informan kunci (*key informant*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, (2) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (dalam Suyanto, 2005: 171-172)

Adapun yang menjadi informan/narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, Pegawai Dispar Kota Bima dan

masyarakat sekitar Pantai Lawata serta informan lain yang di anggap mempunyai hasil mendetail.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal dari data utama. Data primer yang diambil langsung dari Dinas pariwisata Kota Bima yang menjadi objek penelitian yaitu dengan Teknik wawancara kepada pihak Dinas Pariwisata Kota Bima terkait data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan majalah, jurnal penelitian, literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya, yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari informasi yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik dilakukan melalui:

a. Teknik interview (wawancara)

Yaitu pedoman teknik penulisan karya ilmiah dengan cara wawancara mendalam untuk mendapat informasi yang lengkap dan mendalam dari informan. Penelitian ini dilakukan ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka terhadap informan atau pihak yang berhubungan yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang yang berhubungan dengan penelitian, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

b. Teknik Observasi

Adalah pedoman teknik penulisan karya tulisan ilmiah dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat segala gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan peneliti, Dalam penelitian ini mengamati variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

c. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik dokumentasi yang dapat mendukung data primer. Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut: pedoman dokumentasi merupakan merupakan alat pengumpulan data melalui dokumen-dokumen untuk memperoleh catata-catatan atau dokumen yang ada di lokasi peneliti atau sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Sebelum menjelaskan macam-macam teknik analisis data, maka dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian analisis data.

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan dan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiyono (2014:244).

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks yang rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polannya.

b. Tampilan data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table dan gambar.

c. Gambar Kesimpulan/Verivasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi Menurut Afifuddin (2009:143) triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu. Menurut Patton dalam

Afifuddin (2009:143) terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan:

a. Triangulasi data

Menggunakan bergaai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data

c. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi.

Berdasarkan keempat teknik pemeriksaan keabsahan peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Triangulasi data menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai beberapa subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode peneliti menggunakan beberapa metode untuk meneliti suatu hal. Pada kajian ini peneliti menggunakan metode penelitian wawancara, observasi, dan dokumen.